

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi rutinitas bahwa setiap tahun pemerintah membuat anggaran daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah dimulai dari pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang nantinya akan diproses dan diotorisasi sebelum menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nordriawan dkk, 2007). Mardiasmo (2005) juga mengemukakan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2013 terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen ini disusun dalam waktu yang hampir bersamaan tetapi di lembaga-lembaga yang berbeda.

Pada dasarnya APBD menggambarkan terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin baik pengelolaan APBD maka seharusnya kinerja keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menjadi semakin baik pula. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD juga dapat menjadi salah satu alat ukur untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaruh dalam kinerja keuangan daerah.

Dilihat dari manfaat dan penggunaannya, kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah, karena dua hal ini mencerminkan keluar masuknya uang yang ada di pemerintah daerah.

Pada sektor bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan (wikipedia, 2014). Sedangkan pendapatan daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Komponen PAD dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan daerah juga dapat dialokasikan untuk belanja daerah yang akan digunakan untuk memenuhi fasilitas pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil pajak, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan surplus/defisit APBD.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, total aset yang dimiliki oleh suatu daerah juga bisa sangat mempengaruhi bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan dari semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh daerah maka, fasilitas yang dimiliki daerah pun semakin baik, dan seharusnya kinerja keuangan maupun non keuangan pemerintah daerah menjadi semakin baik karena lengkapnya fasilitas yang ada.

Bukan hanya dari faktor keuangan saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal dari faktor non keuangan yang juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah seperti jumlah penduduk. Menurut Rahayu (2014), peranan

penduduk dalam perekonomian sangat nyata, jika suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang banyak maka pelayanan publik yang diberikan akan semakin baik.

Jumlah penduduk dapat mempengaruhi belanja daerah yang dialokasikan dengan peningkatan sarana dan fasilitas yang baik. Semakin baik sarana dan fasilitas suatu daerah, maka diharapkan akan meningkatkan perekonomian penduduk daerah tersebut. Jika perekonomian suatu daerah semakin baik, maka secara otomatis juga akan meningkatkan pendapatan daerahnya, yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul *"Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah"*.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Widya Astuti dan Debby Fitriyani (2012), dengan variabel yang dipilih adalah variabel Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk variabel Jumlah Penduduk diambil dari penelitian Yusron Barnawi (2013). Variabel dependen yang dipakai pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari penelitian Hendro Sumarjo (2010).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kekayaan daerah, belanja daerah dan jumlah

penduduk dengan pendapatan daerah sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kekayaan daerah, belanja daerah dan jumlah penduduk dengan pendapatan daerah sebagai variabel kontrol terhadap kinerja keuangan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat untuk akademisi dan manfaat untuk praktisi. Manfaat untuk akademisi, penelitian ini dapat dipakai sebagai sumber dari penelitian selanjutnya, yang membahas tentang kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah. Melihat penelitian yang membahas tentang kinerja sektor publik masih sangat sedikit.

Manfaat untuk praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi kongkrit mengenai hal apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, juga untuk memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan mengenai kinerja keuangan daerah untuk meningkatkan kinerjanya.